

**LAPORAN KEGIATAN ANALISIS DATA
TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
PADA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022**

Oleh:

**MHD FACHRURROZI POHAN
NIP 199508202019021003**

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. GAMBARAN UMUM TOPIK PENGAWASAN

1. Sektor : Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah
Tema : Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Desa
Topik : Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2022 memetakan 7 sektor, 29 tema dan 99 topik strategis keuangan negara dan pembangunan nasional yang menjadi fokus pengawasan BPKP Tahun 2022. Tujuan pengawasan intern desa adalah dalam rangka memenuhi topik Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2022 yang terkait dengan Pengawasan Desa sekaligus mampu memberikan rekomendasi strategis kepada *stakeholders* utama

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Desa sebagai bagian dari pemerintah perlu dilakukan pengawasan, utamanya terkait besarnya dan beragamnya dana yang dikelola. Dalam melakukan pengawasan intern, BPKP diharapkan berperan dalam mengawal tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari sisi *Assurance* maupun *Consulting*.

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai bagian dari BPKP yang bertugas melakukan pengawasan intern desa diharapkan mampu mengukur efektivitas pengelolaan dana yang dikelola oleh desa.

2. Informasi Umum

Tujuan dari Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa adalah memberikan informasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa Tahun 2022, berupa hasil penilaian atas:

- a) Tren target dan realisasi sumber keuangan desa;
- b) Tren pemanfaatan keuangan desa;

Sasaran Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2022 adalah untuk:

- a) Akuntabilitas Keuangan Desa;

b) Pemanfaatan Keuangan Desa

B. IDENTITAS OBYEK PENGAWASAN

Ruang lingkup Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Keuangan desa yang dimaksud adalah seluruh sumber keuangan yang tercantum pada APBDes. Evaluasi dilakukan Perwakilan BPKP Aceh pada Kabupaten sampel, yaitu Kabupaten Aceh Besar.

C. MATRIK DESAIN PENGAWASAN

Informasi APP: Trend target dan realisasi sumber keuangan desa

No	Pertanyaan Audit	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Prakiraan Hasil
1	Bagaimana gambaran dan tren keuangan Desa selama 3 tahun terakhir ?	1. Database Aplikasi Siskeudes Tahun 2019 s.d. 2022 (Dinas PMD Kab/Kota) 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Anggaran (LRA) Desa Tahun 2019 s.d. 2022 Tk. Kabupaten/Kota 3. APBD Kabupaten/Kota Tahun 2019 s.d. 2022	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Pengolahan Database 3. Wawancara	1. Analisis Deskriptif 2. Analisis Ratio	1. Trend Pendapatan Desa per sumber keuangan 2. Rasio Efektifitas PADes 3. Rasio Bagi Hasil BUMdes 4. Rasio Kemandirian 5. Rasio derajat desentralisasi fiskal 6. Rasio Kecukupan ADD dalam memenuhi SILTAP 7. Rasio Kecukupan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di APBD untuk Desa

Informasi APP: Tren pemanfaatan keuangan desa

No	Pertanyaan Audit	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Prakiraan Hasil
1	Bagaimana Tren Pemanfaatan Keuangan Desa selama 3 tahun terakhir?	1. Database Aplikasi Siskeudes Tahun 2019 s.d. 2022 (Dinas PMD Kab/Kota) 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Anggaran (LRA) Desa Tahun 2019 s.d. 2022 Tk. Kabupaten/Kota	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Pengolahan Database 3. Wawancara	1. Analisis Deskriptif 2. Analisis Ratio	1. Trend Belanja Desa per Bidang 2. Trend Belanja Desa per Jenis Belanja

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

A. KEGIATAN ANALISIS DATA

1. Analisis Rasio

a. Akuntabilitas Keuangan Desa

1) Analisis Tren Target dan Realisasi Sumber Keuangan Desa

Hasil perhitungan tren target dan realisasi seluruh sumber keuangan pada Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, dengan Tahun 2019 sebagai tahun dasar, dengan membandingkan target tiap sumber keuangan desa tahun 2020 dengan 2019, dan 2021 dengan 2019, juga dengan membandingkan realisasi tiap sumber keuangan desa tahun 2020 dengan 2019, dan 2021 dengan 2019.

2) Rasio Efektivitas PADes

Efektivitas PADes diukur dengan membandingkan realisasi PADes dengan target PADes. Kemampuan desa dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan desa semakin baik.

3) Rasio Bagi Hasil BUMDes

Penilaian rasio bagi hasil BUMDes diukur dengan membandingkan antara realisasi pendapatan dari Bagi Hasil BUMDes dengan realisasi Penyertaan Modal kepada BUMDes. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi Bagi Hasil BUMDes dengan realisasi Penyertaan Modal BUMDes dapat disimpulkan efisiensi Penyertaan Modal BUMDes. Semakin besar rasionya maka semakin baik efisiensi Penyertaan Modal BUMDes

4) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan desa dinilai berdasarkan sumber pendapatan desa yaitu total PADes dibandingkan dengan total

pendapatan transfer. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi PADes dengan total Pendapatan Transfer dapat disimpulkan rasio kemandirian desa. Semakin besar rasionya maka semakin baik tingkat kemandirian desa

5) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal dinilai berdasarkan realisasi PADes dibandingkan dengan total realisasi pendapatan. Dengan mengetahui derajat desentralisasi fiskal dapat disimpulkan kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dengan PADes

6) Rasio Kecukupan ADD dalam memenuhi SILTAP

Kecukupan ADD dalam memenuhi SILTAP dinilai dengan membandingkan realisasi belanja untuk SILTAP dengan realisasi pendapatan desa yang bersumber dari ADD. Jika Realisasi SILTAP lebih besar daripada Realisasi Pendapatan ADD, maka bisa dipastikan bahwa Pendapatan ADD tidak mencukupi untuk memenuhi SILTAP

7) Rasio Kecukupan Penganggaran Alokasi Dana Desa di APBD untuk Desa

Kecukupan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di APBD dinilai berdasarkan anggaran ADD pada belanja transfer dengan jumlah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Besar dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)

b) Pemanfaatan Keuangan Desa

Evaluasi atas Pemanfaatan Keuangan Desa dilakukan melalui analisis pada belanja desa selama 3 (tiga) tahun terakhir. Analisis tren

pemanfaatan keuangan desa dilakukan dengan mengklasifikasikan belanja desa berdasarkan jenis belanja dan berdasarkan bidang. dengan membandingkan target per jenis belanja dan bidang tahun 2020 dengan tahun 2019, dan tahun 2021 dengan tahun 2019, juga dengan membandingkan realisasi per jenis belanja dan bidang tahun 2020 dengan tahun 2019, dan tahun 2021 dengan tahun 2019.

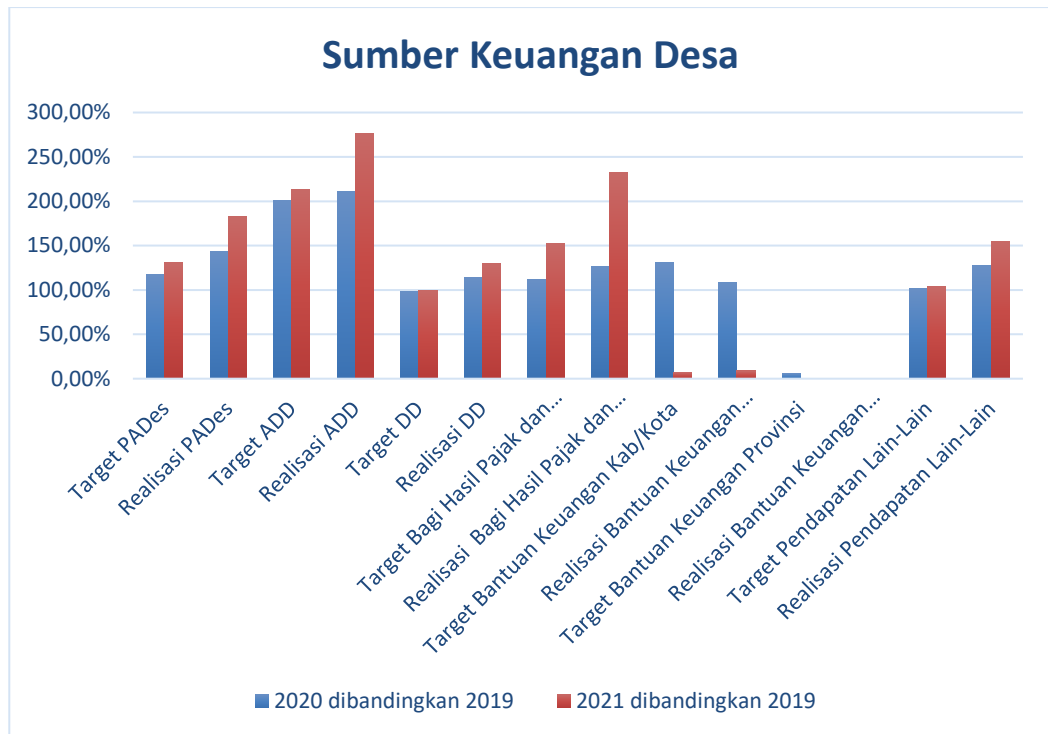
B. ANALISIS DATA DAN HASILNYA

1. Analisis Rasio

a. Akuntabilitas Keuangan Desa

1) Analisis Tren Target dan Realisasi Sumber Keuangan Desa

Sumber Keuangan Desa	Uraian	Indeks tren (2020 dibandingkan 2019)	Indeks tren (2021 dibandingkan 2019)
PADes	Target	117,98	130,56
	Realisasi	143,53	182,57
ADD	Target	201,31	213,43
	Realisasi	210,61	276,68
Dana Desa	Target	98,34	99,10
	Realisasi	114,23	129,40
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Target	111,81	152,77
	Realisasi	126,68	232,53
Bantuan Keuangan Provinsi	Target	6,28	0
	Realisasi	0	0
Bantuan Keuangan Kabupaten Aceh Besar	Target	130,44	7,47
	Realisasi	108,10	9,26
Pendapatan Lain-lain	Target	101,78	103,61
	Realisasi	127,29	154,74



Pada tabel dan grafik diatas, menunjukkan bahwa:

Hasil analisis tren target dan realisasi sumber keuangan desa semuanya mengalami peningkatan, kecuali sumber keuangan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi mengalami penurunan

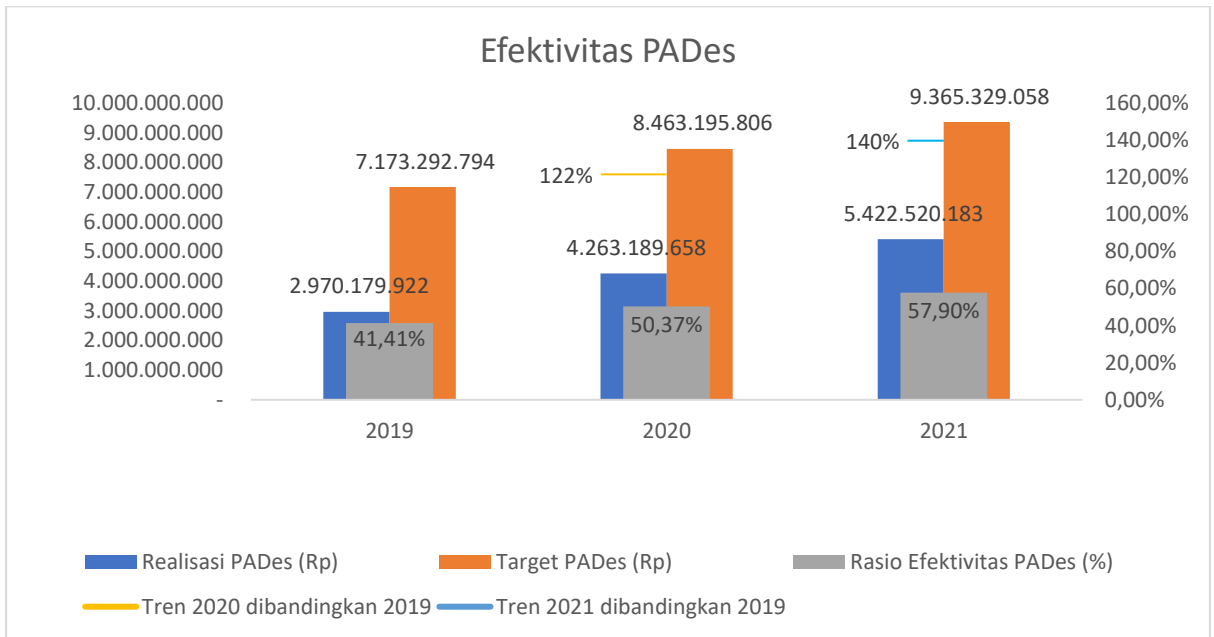
2) Rasio Efektivitas PADes

Rasio Efektivitas PADes Kabupaten Aceh Besar

Tahun Anggaran	Realisasi PADes (Rp)	Target PADes (Rp)	Rasio Efektivitas PADes (%)
2019	2.970.179.922	7.173.292.794	41,41
2020	4.263.189.658	8.463.195.806	50,37
2021	5.422.520.183	9.365.329.058	57,90

Analisis Perbandingan Tren Efektivitas PADes

Tren 2020 dibandingkan 2019	Tren 2021 dibandingkan 2019
122%	140%



Pada tabel dan grafik diatas, menunjukkan bahwa:

Rasio efektifitas PADes Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masing-masing adalah 41,41%, 50,37%, 57,90%, dan 1,41%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan PADes, kecuali pada tahun 2022 yang baru berjalan sampai dengan triwulan I sehingga belum dapat menggambarkan tren peningkatan PADes yang sebenarnya/tahunan

3) Rasio Bagi Hasil BUMDes

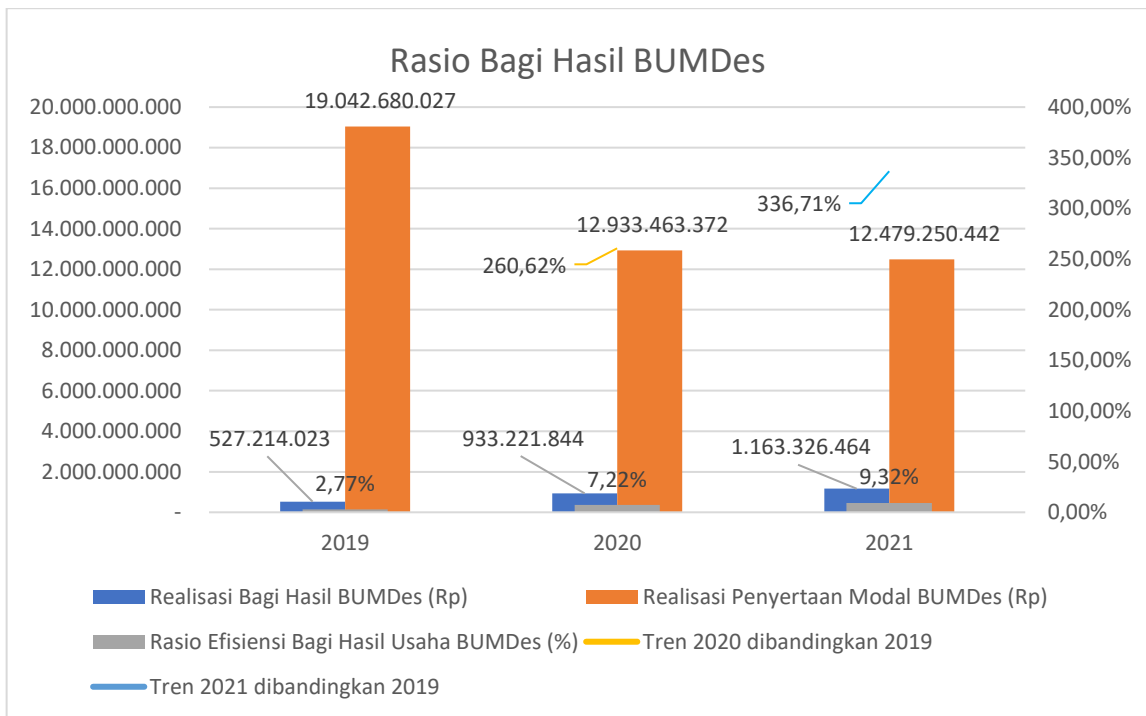
Rasio Bagi Hasil BUMDes Kabupaten Aceh Besar

Tahun Anggaran	Realisasi Bagi Hasil BUMDes (Rp)	Realisasi Penyertaan Modal BUMDes (Rp)	Tingkat Efisien (%)
2019	527.214.023	19.042.680.027	2,77
2020	933.221.844	12.933.463.372	7,22
2021	1.163.326.464	12.479.250.442	9,32
2022	18.330.000	0,00	0,00

Analisis Perbandingan Tren Bagi Hasil BUMDes

Tren 2020 dibandingkan 2019	Tren 2021 dibandingkan 2019

260,62%	336,71%
---------	---------



Rasio Bagi Hasil BUMDes Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masing-masing adalah 2,77%, 7,22% dan 9,32%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan Bagi Hasil BUMDes

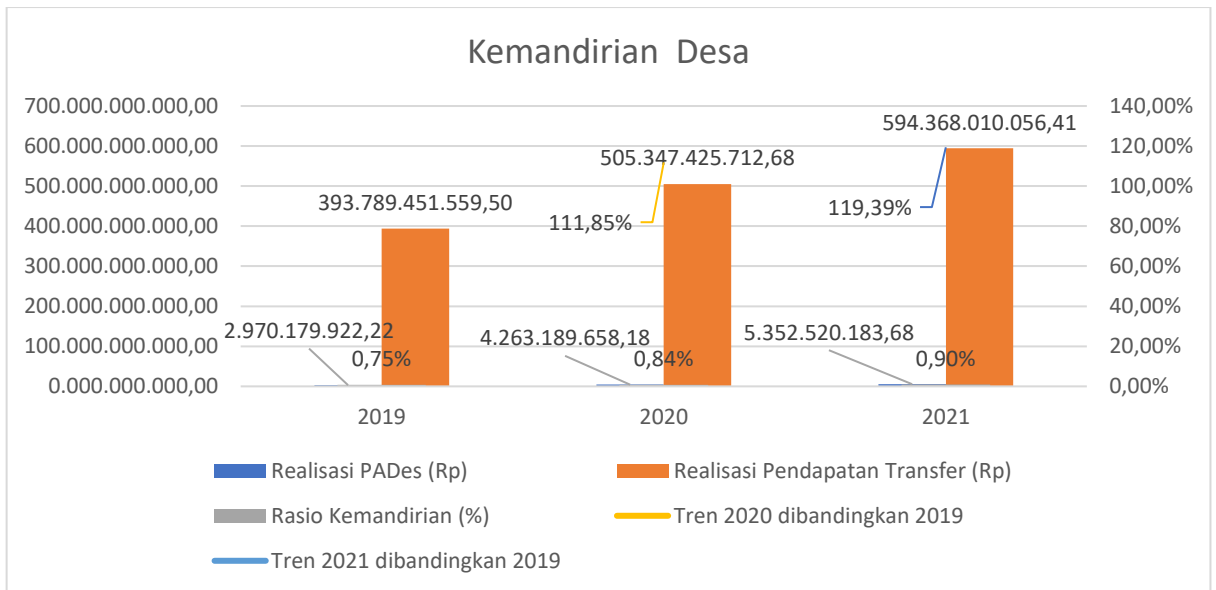
4) Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian pada Kabupaten Aceh Besar

Tahun Anggaran	Realisasi PADes (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian
2019	2.970.179.922	393.789.451.559	0,75	Tidak Mampu
2020	4.263.189.658	505.347.425.713	0,84	Tidak Mampu
2021	5.352.520.184	594.368.010.056	0,90	Tidak Mampu
2022	125.330.000	21.131.523.465	0,59	Tidak Mampu

Analisis Perbandingan Tren Kemandirian Desa

Tren 2020 dibandingkan 2019	Tren 2021 dibandingkan 2019
111,85%	119,39%



Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa:

Rasio kemandirian Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masing-masing adalah 0,75%, 0,84%, 0,90% dan 0,59%. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan, namun walaupun mengalami peningkatan masih termasuk ke dalam kategori “Tidak Mampu”.

5) Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun Anggaran	Realisasi PADes (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal
2019	2.970.179.922	397.404.216.596	0,75	Sangat Kurang
2020	4.263.189.658	510.431.128.139	0,84	Sangat Kurang
2021	5.422.520.183	601.185.810.674	0,90	Sangat Kurang
2022	125.330.000	21.337.291.481	0,59	Sangat Kurang

Analisis Perbandingan Tren Derajat Desentralisasi Fiskal

Tren 2020 dibandingkan 2019	Tren 2021 dibandingkan 2019
111,75%	120,68%



Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa:

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masing-masing adalah 0,75%, 0,84%, 0,90 dan 0,59%. Kondisi tersebut menunjukkan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan sampai tahun 2021 namun masih cenderung masuk dalam kategori “Sangat Kurang”.

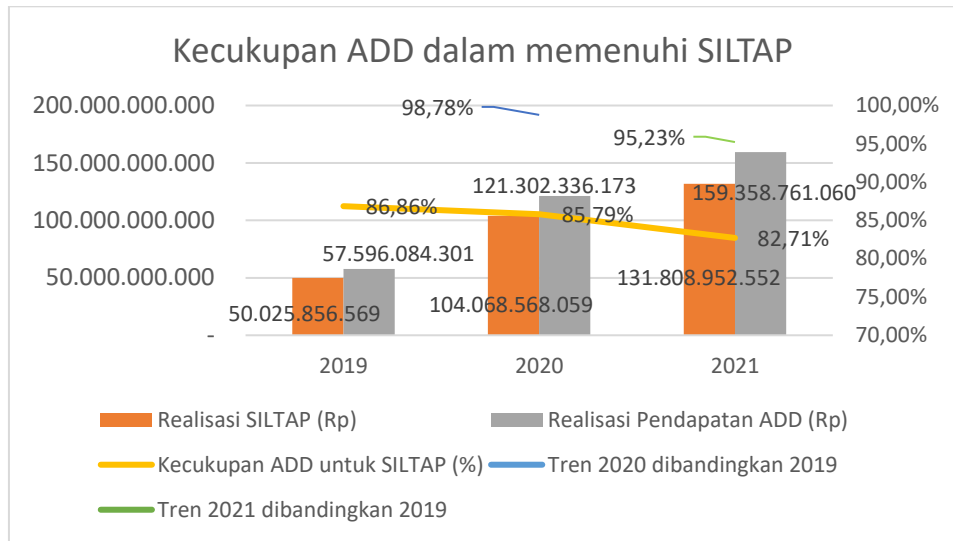
6) Kecukupan ADD dalam Memenuhi SILTAP

Rasio Kecukupan ADD dalam Memenuhi SILTAP

Tahun Anggaran	Realisasi SILTAP (Rp)	Realisasi Pendapatan ADD (Rp)	Rasio Kecukupan ADD dalam Memenuhi SILTAP (%)
2019	50.025.856.569	57.596.084.301	86,86
2020	104.068.568.059	121.302.336.173	85,79
2021	131.808.952.552	159.358.761.060	82,71
2022	358.789.260	1.116.616.100	32,13

Analisis Perbandingan Tren Kecukupan ADD dalam Memenuhi SILTAP

Tren 2020 dibandingkan 2019	Tren 2021 dibandingkan 2019
98,78%	95,23%



Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa:

Rasio Kecukupan ADD dalam memenuhi SILTAP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masing-masing adalah 86,86%, 85,79%, 82,71% dan 32,13%. Kondisi tersebut menunjukkan rasio kecukupan ADD dalam memenuhi SILTAP Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan.

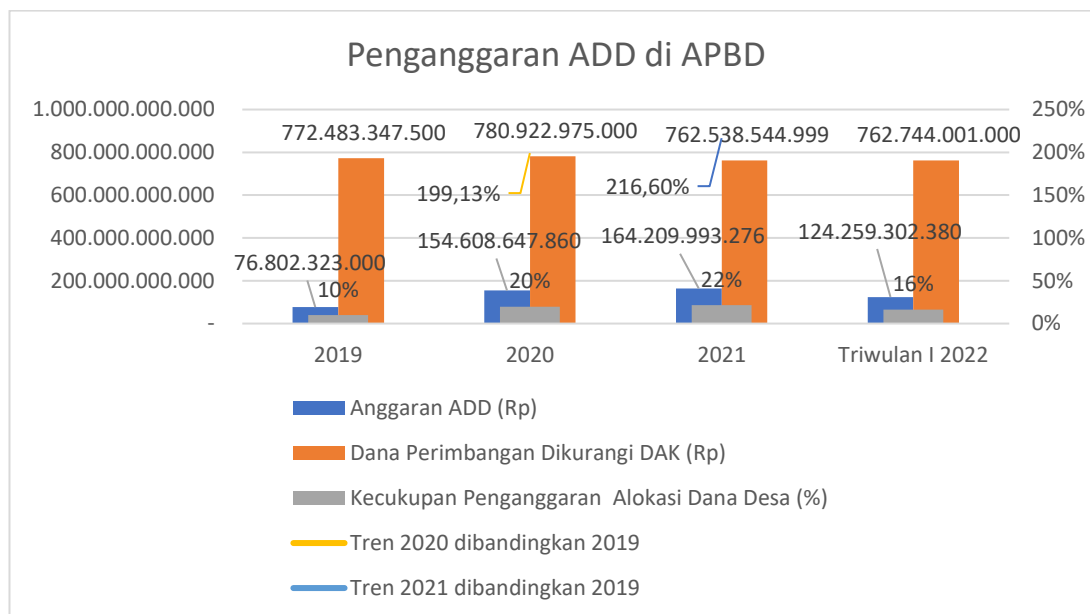
Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Aceh Besar telah dapat memenuhi kebutuhan belanja SILTAP dengan menggunakan ADD dengan realisasi SILTAP lebih kecil dari pada realisasi pendapatan ADD

7) Kecukupan Penganggaran Alokasi Dana Desa di APBD untuk Desa
Kecukupan Penganggaran ADD di APBD untuk Desa

Tahun Anggaran	Anggaran ADD (Rp)	Dana Perimbangan-DAK (Rp)	Persentase (%)
2019	76.802.323.000	772.483.347.500	9,94
2020	154.608.647.860	780.922.975.000	19,80
2021	164.209.993.276	762.538.544.999	21,53
2022	124.259.302.380	762.744.001.000	16,29

Analisis Perbandingan Tren Penganggaran Alokasi Dana Desa di
APBD untuk Desa

Tren 2020 dibandingkan 2019	Tren 2021 dibandingkan 2019
199,13%	216,60%



Pada tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa:

Rasio Kecukupan Penganggaran ADD di APBD untuk Desa pada Kabupaten Aceh Besar tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 masing-masing adalah 9,94%, 19,80%, 21,53% dan 16,29%. Kondisi tersebut menunjukkan rasio penganggaran ADD di APBD untuk Desa pada Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Hal tersebut **telah** memenuhi kewajiban penganggaran yang ditentukan yaitu ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi DAK

b. Pemanfaatan Keuangan Desa

Pemanfaatan keuangan desa per jenis belanja pada 604 desa di Kabupaten Aceh Besar adalah :

No	Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)
1	2019	50.044.949.769	89.468.458.049	225.040.632.726	239.323.018
2	2020	108.976.186.939	103.594.244.042	191.824.417.309	46.073.064.914
3	2021	137.805.707.492	143.670.662.579	183.679.536.054	85.938.600.302
4	2022	30.702.120	724.218.188	532.649.300	1.278.723.500

Analisis Perbandingan Tren Per Jenis Belanja

Uraian	2020 dibandingkan 2019	2021 dibandingkan 2019
Belanja Pegawai	217,76%	275,36%
Belanja Barang dan Jasa	115,79%	160,58%
Belanja Modal	85,24%	81,62%
Belanja Tidak Terduga	19251,41%	35909,04%
Total Belanja	123,49%	151,07%

Dari tabel di atas pemanfaatan Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Tak Terduga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021, sedangkan tahun 2022 belum terlihat trennya karena masih Triwulan I. Sedangkan belanja modal mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pandemi Covid 19 sejak Triwulan IV tahun 2020 sehingga sebahagian alokasi belanja modal di alokasikan ke Belanja Tak Terduga

Pemanfaatan keuangan desa per bidang kewenangan desa pada 604 desa di Kabupaten Aceh Besar disajikan pada tabel berikut.

No	Tahun	Bidang 1	Bidang 2	Bidang 3	Bidang 4	Bidang 5
1	2019	88.869.417.958	198.586.655.854	40.422.436.156	36.880.777.170	34.076.423
2	2020	155.967.199.392	169.777.062.140	45.354.259.271	17.949.497.659	61.419.894.743
3	2021	201.857.597.159	190.725.545.212	54.107.423.433	18.707.158.135	85.696.782.488
4	2022	388.334.548	336.174.060	98.752.000	464.309.000	1.278.723.500

Analisis Perbandingan Tren per Bidang

Uraian	2020 dibandingkan 2019	2021 dibandingkan 2019
Tren Bidang 1	175,50	227,14
Tren Bidang 2	85,49	96,04
Tren Bidang 3	112,20	133,85
Tren Bidang 4	48,67	1,26
Tren Bidang 5	180.241,61	251.484,09

Berdasarkan tabel di atas, pemanfaatan keuangan desa per bidang kewenangan desa Tahun 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan seluruh bidang kewenangan mengalami kenaikan baik tahun 2020 maupun tahun 2021. Kenaikan tertinggi terjadi pada Bidang Penanggulangan Bencana yaitu tahun 2020 sebesar 180.241,61% dan tahun 2021 sebesar 251.484,09%. Hal tersebut disebabkan pemanfaatan keuangan bidang 5 dimulai sejak tahun 2020 dalam rangka mendukung penanganan *COVID-19*, sedangkan pada tahun 2019 belum ada desa yang menganggarkan rekening belanja bidang 5.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan analisis data terhadap Trend target dan realisasi sumber keuangan desa, dapat diperoleh gambaran dan tren keuangan desa selama 3 tahun terakhir yaitu:

- Tren target dan realisasi sumber keuangan desa semuanya mengalami peningkatan, kecuali sumber keuangan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi mengalami penurunan
- Adanya tren peningkatan PADes, kecuali pada tahun 2022 yang baru berjalan sampai dengan triwulan I sehingga belum dapat menggambarkan tren peningkatan PADes yang sebenarnya/tahunan
- Adanya tren peningkatan Bagi Hasil BUMDes
- Tingkat kemandirian Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan, namun walaupun mengalami peningkatan masih termasuk ke dalam kategori “Tidak Mampu”
- Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan sampai tahun 2021 namun masih cenderung masuk dalam kategori “Sangat Kurang”
- Desa di Kabupaten Aceh Besar telah dapat memenuhi kebutuhan belanja SILTAP dengan menggunakan ADD, dengan realisasi SILTAP lebih kecil dari pada realisasi pendapatan ADD
- Kabupaten Aceh Besar telah memenuhi kewajiban penganggaran yang ditentukan yaitu ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi DAK

Berdasarkan analisis data terhadap Tren pemanfaatan keuangan desa, dapat diperoleh informasi terhadap Tren Pemanfaatan Keuangan Desa selama 3 tahun terakhir, yaitu:

- Berdasarkan per jenis belanja, pemanfaatan Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Tak Terduga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021, Sedangkan belanja modal mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pandemi Covid 19 sejak Triwulan IV tahun 2020 sehingga sebahagian alokasi belanja modal di alokasikan ke Belanja Tak

Terduga

- Berdasarkan per bidang, pemanfaatan keuangan desa per bidang kewenangan desa Tahun 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan seluruh bidang kewenangan mengalami kenaikan baik tahun 2020 maupun tahun 2021